

**Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakan Pasal 45 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet  
(Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Choiril Rosid**

**105010100111093**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Choiril Rosid**

**b. NIM** : **105010100111093**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

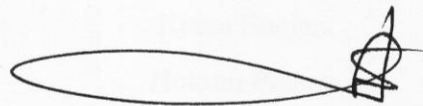
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Bambang Sujito, S.H., M.H.

NIP.19520605 198003 1 006




Alfons Zakaria, S.H., M.LLM.

NIP .19800629 200501 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.H.

NIP.19590406 198601 2 001

## SUMMARY

Choiril rosid, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2014, **Factors Contributing Investigator Police Not Using Article 45 Paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction Handling Crime To Gambling Through the Internet Media (Study in East Java Regional Police)**, Dr. Bambang Sudjito, SH, M. Hum., Alfons Zakaria, SH, M.LLM.

In writing this essay, the author discusses the investigation of criminal gambling via the Internet. Background author discusses in this case because in modern times with the rapid technological advances such as this, have an impact on the revolution conventional forms of crime into a modern crime. One of such offenses are gambling via the Internet. Enforcement of the criminal act of gambling that uses the internet to date despite the passing of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Technology can be said it is still not satisfactory.

Lifting the formulation of the problem (1) How the police handling of the offenses of gambling via the Internet? (2) Factors that cause the police investigators do not use Article 45 paragraph (1) of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions for the handling of criminal acts through the medium of internet gambling in the East Java Police ?. This research is an empirical study of law with juridical approach soseologis. The location of this research is in the area of Police of East Java (East Java Police). Types and sources of data are primary data and secondary data. The primary data obtained from interviews with the respondents Brigadier Dwi Luhung, SH, and Brigadier Andri Rosadi, SH, both East Java Police Investigator Investigator especially in the Special Crime Directorate are investigating Cyber Crime Crime (cyber Crame), and also Ibtu Agung Ari, SH, MM, and Aiptu Made Arianto, SH Investigators are both especially East Java Regional Police Criminal Investigator in the Directorate General are investigating Crime Gambling. Secondary data were obtained through library research or literature, the study documents, and internet access. Data analysis techniques mnggunakan qualitative descriptive analysis.

From the results of this research is that the handling of a criminal offense related to gambling using the internet is by using the Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic technology is still not able to walk up. This is due to regulations in the ITE law difficult to implement, especially in procedural law. It is expected that the law enforcement is not just a police investigator alone but also the public prosecutor and the court to maximize the function of coordination in the handling of a criminal offense of gambling using the Internet media, so that the evil criminal offense of gambling via the Internet can be handled with maximum.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYIDIK KEPOLISIAN TIDAK MENGGUNAKAN  
PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH  
JAWA TIMUR)

RINGKASAN

Choiril Rosid, Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Sujidto, S.H., M.Hum. dan Alfons Zakaria,  
S.H., M.LLM.

Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Abstraksi

Internet merupakan buah perkembangan dalam dunia teknologi dan informasi. Hal tersebut pula yang menciptakan bentuk kejahatan baru dalam tindak pidana perjudian yaitu perjudian melalui media internet (perjudian online). Penanganannya pun tidak lagi berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) undang-undang ITE. Akan tetapi dalam proses penanganannya masih belum efektif, dikarenakan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengalami banyak kendala. Kendala tersebut seperti pada penerapan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) undang-undang ITE yakni penggeledahan dan penyitaan serta penangkapan dan penahanan terhadap tersangka perjudian online, penyidik wajib melalui penuntut umum meminta surat penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Jangka waktu yang sangat singkat inilah yang menjadi kendala penyidik dalam menerapkan undang-undang ITE.

Kata Kunci : Perjudian Online, Undang-undang ITE.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYIDIK KEPOLISIAN TIDAK MENGGUNAKAN  
PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH  
JAWA TIMUR)

SUMMARY

Choiril Rosid, Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Sujidto, S.H., M.Hum. dan Alfons Zakaria, S.H., M.LLM.

Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum

Faculty of Law

Brawijaya University

Abstraction

Internet is the fruit of development in the world of technology and information. It also is creating a new form of crime in the criminal act of gambling is gambling via the Internet (online gambling). Handling was no longer under Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, will tentapi use Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Technology by using Article 27, paragraph (2) and Article 45 paragraph (1) the ITE law. But in the process penangananya still not effective, because the East Java Regional Police investigators (Polda Jatim) has many obstacles. Constraints such as the application of Article 43 paragraph (3) and (6) the ITE law search and seizure and the arrest and detention of suspects of online gambling, the investigator is obliged by the public prosecutor requested the determination letter head of the local district court within one times two twenty-four hours. Jangaka very short time which is the constraint investigator in applying the ITE law.

Keywords: Online Gambling, ITE Law.

## A. PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan dunia teknologi dan informasi disaat ini tidak bisa dipungkiri telah membawa manusia kepada era globalisasi, hal ini yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Dalam pesatnya kemajuan teknologi itu sendiri, internet merupakan salah satu media paling utama yang dapat digunakan dalam bersosialisasi setiap hari. Melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang mungkin belum pernah sama sekali dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Di dunia kejahatan, perkembangan teknologi informasi tersebut juga memberikan dampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi modern. Jenis kegiatan yang dilanggar mungkin sama, akan tetapi media yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan tersebut berbeda yaitu dalam hal ini dengan menggunakan media internet. Kejahatan dengan media internet ini akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili oleh aparat penegak keadilan. Kejahatan yang berhubungan dengan internet tersebut antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet yang dapat berupa judi togel (Totohan Gelap) dan juga judi bola. Kejahatan tersebut bukan lagi merupakan kejahatan konvensional saja, akan tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet.

Dalam KUHP, tindak pidana perjudian ini telah diatur dalam Pasal 303 KUHP yang pelakunya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 542 KUHP, namun dalam perkembangannya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 542 KUHP menjadi tidak berlaku dan diganti dengan Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan untuk perjudian dengan menggunakan media internet saat ini telah lahir Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Keluarnya UU tentang ITE tersebut dikarenakan telah muncul berbagai bentuk kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) yang tidak dapat lagi dikenakan sanksi berdasarkan Pasal dalam KUHP yang ada.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seharusnya bisa menjadi pedoman dan dasar hukum bagi aparat

penegak hukum untuk menangani tindak pidana perjudian melalui internet. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Tindak pidana perjudian melalui internet, dilakukan melalui system elektronik informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, di samping itu alat bukti elektronik di atas dianggap sebagai perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, karena disetarakan sebagai alat bukti surat, sehingga pelaku perjudian melalui internet dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Pada tindak pidana perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum, dalam hal ini sebagai alat bukti petunjuk.<sup>1</sup>

Kita tahu dalam penanganan kasus-kasus yang menggunakan media internet khususnya perjudian online tersebut sudah ada satuan *cybercrime* yang khusus menangani permasalahan tersebut. Akan tetapi satuan *cybercrime* tersebut untuk saat ini masih ada di tingkat daerah atau Kepolisian Daerah saja atau untuk daerah Jawa Timur berada di Polda Jatim yaitu yang berada di Surabaya. Akan tetapi penerapan Undang-Undang ITE mengenai kasus perjudian online ditingkat Polda tersebut kurang begitu membanggakan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil pra survei di Direktorat Kriminal Khusus (*cyber crime*) Polda Jatim, sejak keluarnya UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik baru tiga kasus perjudian melalui media internet yang pernah diterapkan Undang-Undang ITE tersebut.

Pada intinya penerapan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor. 11 Tahun 2008 yang garis besarnya mengatur mengenai tindak pidana perjudian menggunakan media

---

<sup>1</sup> Hetty Hassanah, 2008, **Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Makalah Ilmiah Unikom, Volume 8, No, 2, Universitas Komputer Indonesia.

internet pernah diterapkan di Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim. Akan tetapi terdapat banyak kendala yang menyebabkan tim penyidik kepolisian susah menerapkan undang-undang tersebut. Terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan Undang-Undang ITE terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut. Menurut Brigadir Dwi Luhung, yang bertugas di Yunit 4 Kejahatan Dunia Maya Polda Jatim menerangkan bahwa<sup>2</sup> tim penyidik kepolisian mengalami hambatan seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum, penyidik diwajibkan meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Beliau juga mengatakan bahwa permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet atau elektronik tersebut yaitu karena masih belum sepahamnya pemikiran antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum dan juga pejabat pengadilan mengenai pemahaman terkait undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

Permasalahan tersebutlah yang membuat tim penyidik kepolisian lebih memilih mengenyampingkan untuk menerapkan undang-undang ITE karena sarat materiil dipasal 43 ayat (6) yang tidak terpenuhi. Selain hal itu, kasus perjudian melalui media internet ini kebanyakan tersangkanya tertangkap tangan dan pasti dilakukan penahanan, maka keluarnya surat penetapan penahanan dari ketua pengadilan negeri setempat sangat dibutuhkan segera.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat mengemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet?
2. Faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Brigadir Dwi Luhung, pada tanggal 28 Maret 2014 di kantor Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim, Surabaya.



untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet.**

Penanganan pihak kepolisian terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi tergolong dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat langkah yang dilakukan pihak kepolisian yang tercakup dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam KUHAP dan juga Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.<sup>3</sup>

#### **1. Menerima Laporan**

Untuk tindak pidana perjudian melalui media elektronik atau internet ini yang perlu kita ketahui yaitu merupakan tindak pidana dengan proses penyidikan dengan Laporan Penyidikan Model A. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam proses penyidikan yang tidak sama dengan proses penyidikan yang menggunakan laporan penyidikan model B seperti dalam tindak pidana pencemaran nama baik, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Sumber atau bahan yang berupa pengetahuan atau persangkaan telah terjadinya suatu tindak pidana perjudian ini dapat penyidik peroleh dari berbagai sumber, yaitu :

- a. Laporan;
- b. Tertangkap tangan;
- c. Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Agung Ari, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

Jika sumber tersebut penyidik dapatkan melalui laporan, maka sebelum melakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk menyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana.

Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur jarang sekali menjumpai tertangkap tangannya tersangka untuk tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut. Hal ini dikarenakan para tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut sangat cerdas, jadi perlu dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu oleh kepolisian guna memastikan perbuatan tersebut benar merupakan perbuatan tindak pidana.<sup>4</sup>

## **2. Melakukan Penyelidikan**

Dan tahap awal dan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap adanya laporan tindak pidana perjudian yang diterima oleh penyidik atau Polri yaitu dilakukannya penyelidikan. Proses penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut perlu dilakukan karena setiap laporan yang diterima oleh penyidik atau Polri dari masyarakat tersebut belum tentu benar sehingga untuk mengetahui apakah suatu laporan tersebut benar-benar merupakan tindak pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan.<sup>5</sup>

Penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana perjudian dapat dilakukan oleh tim penyidik dengan melakukan beberapa tindakan yang telah diatur dalam Perkap Nomor. 12 Tahun 2012, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Melakukan Pengamata (*observasi*)
- b. Melakukan Wawancara (*interview*)
- c. Melakukan Pembuntutan (*surveillance*)

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

d. Melakukan Penyamaran (*undercover*)

### **3. Melakukan Penyidikan**

Setelah dilakukannya penyelidikan oleh tim penyidik dan berhasil mendapatkan fakta-fakta, keterangan-keterangan dan barang bukti yang cukup tentang telah dilakukannya tindak pidana perjudian oleh tersangka. Penyidik wajib segera membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik, hal ini juga sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) KUHAP. Laporan hasil pelaksanaan penyelidikan tersebutlah yang digunakan untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidak suatu peristiwa yang diduga tindak pidana ke tahap penyidikan.<sup>7</sup>

Setelah masuk ke tahap penyidikan pastinya suatu peristiwa tersebut sudah dapat dianggap sebagai peristiwa tindak pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana perjudian. Dalam tahapan penyidikan ini tim penyidik kepolisian unit perjudian dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan. Mengenai upaya paksa yang sering dilakukan oleh tim penyidik kepolisian tindak pidana perjudian, yaitu :<sup>8</sup>

#### **a. Melakukan Penangkapan**

Sebelum diadakannya penangkapan terhadap tersangka tindak pidana perjudian online, tim penyidik kepolisian mempersiapkan barang bukti yang telah didapat dalam proses penyelidikan. Penyidik tidak berani melakukan penangkapan sebelum yakin bahwa tersangka yang merupakan target penangkapan telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Hal ini guna menghindari adanya kesalahpahaman dalam melakukan penangkapan. Tujuan dari penangkapan ini berguna untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

kepentingan penyelidikan atau kepentingan penyidikan yang dilakukan tim penyidik tindak pidana perjudian online.

Dalam hal melakukan penangkapan tim penyidik selalu menaati tata cara penangkapan, hal ini selalu dilakukan oleh penyidik guna sahnyanya penangkapan. Permasalahan yang sering di alami oleh penyidik yaitu apabila tersangka yang bertempat tinggal di daerah-daerah terisolir dengan transportasi yang sulit, apalagi jika di daerah yang komunikasinya tertutup.<sup>9</sup>

#### **b. Melakukan Pengeledahan**

Pengeledahan menurut KUHAP di bagi menjadi dua macam, yakni pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Kedua pengeledakan tersebut harus dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik. Pengeledahan ini guna melengkapi barang bukti yang kemungkinan disembunyikan oleh tersangka. Pengeledahan tersebut diperlukan penyidik dalam proses penyidikan.

#### **c. Penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Pelaksanaan penyitaan ini bertujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.

Bentuk-bentuk penyitaan yang sering dilakukan atau dialami oleh penyidik tindak pidana perjudian online di unit perjudian ini, yaitu:<sup>10</sup>

##### **1) Penyitaan Biasa**

Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan prosedur biasa, yaitu dengan menggunakan aturan umum dari penyitaan. Penyitaan biasa seperti inilah yang sering diupayakan oleh penyidik kepolisian. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik tindak pidana perjudian online menurut tata cara yang telah diatur dala KUHAP.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibtu Agung Ari, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

2) Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Penyitaan dalam keadaan yang perlu dan mendesak ini adalah penyitaan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana pada Pasal 38 ayat (1), yaitu penyitaan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, dilakukan hanya pada benda bergerak sehingga wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2)). Penyitaan ini merupakan pengecualian dari penyitaan biasa, dalam Pasal 38 ayat (3) memberikan pengecualian untuk dimungkinkan dilakukannya penyitaan tanpa melakukan tata cara yang ditentukan pada Pasal 38 ayat (1).

3) Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan ini juga merupakan pengecualian dari penyitaan bentuk biasa, yaitu suatu penyitaan yang dilakukan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan tertangkap tangan terhadap benda dan alat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP.

**d. Penahanan**

Tujuan dari tindakan penahanan ini jika dilihat dari Pasal 20 KUHAP yaitu bahwa tujuan dari penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim. Alasan penahanan ini dalam berbagai literature sering dibagi menjad dua, H Rusli Muhammad dalam bukunya juga membagi dua alasan, yakni :<sup>11</sup>

1) Alasan Objektif

Disebutkan sebagai alasan objektif karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan penahanan. Yang termasuk alasan objektif adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

2) Alasan Subjektif

---

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 29.

Yang dimaksud alasan subjektif ini adalah alasan yang muncul dari penilaian subjektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri. Dan adapun yang termasuk alasan subjektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Adanya penahanan yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap tersangka tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut memiliki wewenang dengan lama masa penahanan dua puluh hari. Jika masa penahanan telah habis sementara pemeriksaan belum selesai, maka masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama empat puluh hari, sehingga jika dijumlahkan maka untuk kewenangan penyidik melakukan penahanan adalah selama enam puluh hari.

#### **4. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi**

Selama dalam tahapan pemeriksaan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga terhadap saksi-saksi lain yang diperlukan dalam penyidikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Untuk tersangka tindak pidana perjudian tentunya sudah tidak perlu lagi melakukan pemanggilan karena dari awal sudah dilakukan penangkapan. Pemanggilan ini hanya ditujukan terhadap saksi maupun saksi ahli yang sekiranya diperlukan guna kepentingan penyidikan.

Terhadap seorang saksi yang apabila telah dilakukan pemanggilan tapi ia tidak datang, maka sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Dan apabila seorang tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat datang dengan memberi alasan yang patut dan wajar, maka penyidik itu datang ke tempat diamannya.<sup>12</sup>

#### **5. Pembuatan Berita Acara Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) KUHAP, setelah selesainya pemeriksaan yang diperlukan oleh penyidik, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

Pada berita acara tersebut juga dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan dan lainnya apabila hal tersebut telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana.

## **6. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum**

Yang terakhir yaitu apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara yang telah dibuat tersebut kepada penuntut umum. Penyerahan ini meliputi dua tahapan, yaitu :

- a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai.

Dua tahap tersebut dikarenakan pada tahap penyerahan berkas perkara yang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum apabila masih dirasa kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi menurut Bapak Made Arianto terhadap berkas perkara tindak pidana perjudian ini jarang sekali JPU mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Hal ini dikarenakan untuk tindak pidana perjudian, berkas perkara yang dibuat relatif mudah sehingga mudah untuk dilengkapi.<sup>13</sup> Berikut merupakan bagan dari Tahapan-Tahapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (LP model A/temuan) :

## **2. Faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur.**

- a. Faktor keadaan atau aturan hukum (peraturan)

Efektif tidaknya suatu hukum atau peraturan dipengaruhi oleh keadaan atau aturan hukum itu sendiri, yang dalam hal ini terbatas pada undang-undang. Faktor

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkros secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

Akan tetapi peraturan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian melalui media internet belum cukup sistematis. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh si pembuat UU sehingga aparat penegak hukum sebagai aparat pelaksana peraturan sulit menerapkan pasal tersebut. Ketidak jelasan maksud dan tujuan tersebut dapat dilihat dari Pasal mengenai hukum acara pidananya yakni Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) yang dianggap oleh aparat penegak hukum sebagai hambatan dalam penindakan tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut.

b. Faktor dari aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak hukum;

Efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis atau peraturan yaitu dari aparat penegak hukumnya. Dalam hal ini diharapkan SDM (Sumber Daya Manusia) harus memiliki keterampilan profesional yang baik dan juga memiliki mental yang baik juga. Selain hal itu para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaatinya. Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu<sup>14</sup>.

- 1) Kemanusiaan
- 2) Keadilan
- 3) Kepatutan
- 4) Kejujuran

Pentingnya penekanan dan tuntutan bagi setiap aparat penegak hukum akan hal tersebut di era modern saat ini dapat meningkatkan moralitas para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

---

<sup>14</sup> E. Sumarsono, **Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hlm 115-156.



Akan tetapi pada kenyataannya terkait Sumber Daya Manusia, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan banyak yang belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal mengenai tindak pidana perjudian menggunakan media internet. Bahkan antara para penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan seringkali beradu argumen mengenai penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terkait penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis cantumkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet oleh aparat penegak hukum masih dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan juga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik kepolisian mengenyampingkan penanganan yang ada dalam undang-undang ITE dikarenakan susah memenuhi salah satu pasal mengenai hukum acaranya, yaitu pada Pasal 43 ayat (3) dan (6) UU ITE. Sedangkan dalam penanganan tersangka dilakukan dengan menggunakan Laporan Pemeriksaan Model A atau Temuan.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penanganan mengenai tindak pidana perjudian melalui media internet ini. Secara garis besar faktor yaitu keadaan atau aturan hukumnya dan satu lagi yaitu aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak hukum. Yang pertama, keadaan atau aturan hukum pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE ini dianggap masih belum sistematis yang menyebabkan ketidak jelasan maksud dan tujuan dari si pembuat undang-undang tersebut. Yang kedua, aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak hukum. Hal ini terkait pada Sumber Daya Manusia, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan banyak yang belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari

adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, saran yang penulis ingin sampaikan yaitu bahwa lembaga hukum merupakan salah satu alat penegak hukum yang sangat menentukan apakah hukum atau suatu aturan tertulis telah ditegakkan sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu guna keadilan dan kesejahteraan masyarakat atau belum. Diperlukan penegak hukum yang baik dan juga kordinasi yang aktif bagi setiap aparat penegak hukum guna mencapai tujuan hukum tersebut. Akan tetapi tidak kalah pentingnya substansi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan harus juga baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesemuanya itu guna menjamin terlaksananya negara hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Literatur Buku :**

E.Sumarsono, **Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hlm 115-156.

Hetty Hassanah, 2008, **Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Makalah Ilmiah Unikom, Volume 8, No, 2, Universitas Komputer Indonesia.

Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana *Kontemporer***, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 29.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomo. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.